

TESIS

**POLITIK HUKUM PENGATURAN *CITIZEN LAWSUIT* DI
INDONESIA: PROBLEM DAN SOLUSI DALAM
PENUNTUTAN HAK SIPIL WARGA NEGARA**



DIANA DESSY NOVITASARI

No. Mhs.: 205203238/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022**





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : DIANA DESSY NOVITASARI
Nomor Mahasiswa : 205203238/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : **POLITIK HUKUM PENGATURAN *CITIZEN LAWSUIT* DI INDONESIA: PROBLEM DAN SOLUSI DALAM PENUNTUTAN HAK SIPIIL WARGA NEGARA**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
-----------------	---------	--------------

1. <u>Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.</u>	<u>19 April 2022</u>	
---	----------------------	---

2. <u>Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.</u>	<u>.13 Juni 2022</u>	
--	----------------------	---

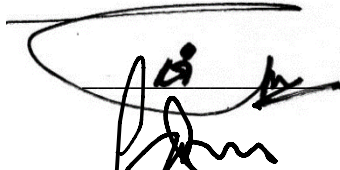
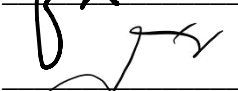



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : DIANA DESSY NOVITASARI
Nomor Mahasiswa : 205203238/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : **POLITIK HUKUM PENGATURAN CITIZEN
LAWSUIT DI INDONESIA: PROBLEM DAN
SOLUSI DALAM PENUNTUTAN HAK
SIPIIL WARGA NEGARA**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2022

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum	
2. Sekretaris	Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum	

Ketua Program Studi:



Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum:**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Diana Dessy Novitasari

Nomor Mahasiswa : 205203238/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Politik Hukum Pengaturan *Citizen Lawsuit* Di Indonesia: Problem Dan Solusi Dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara”** merupakan hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Diana Dessy Novitasari

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkat, kekuatan, dan kasih-Nya. Berkat curahan rahmat Tuhan, penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum tesis ini yang berjudul, “Politik Hukum Pengaturan *Citizen Lawsuit* Di Indonesia: Problem Dan Solusi Dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara.” Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini, banyak pihak yang sudah membantu serta membimbing, oleh karena itu penulis dengan hormat yang setinggi-tingginya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Hyronimus Rhyti, S.H., L.L.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum Tesis ini, yang sangat sabar dan penuh dengan kasih membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada penulis sampai tesis ini selesai.
5. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum Tesis ini, yang sangat sabar dan penuh kasih membimbing serta memberi arahan dan petunjuk sehingga tesis ini selesai.
6. Bapak Haruno Patriadi, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan tesis ini.

7. Bapak Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan tesis ini
8. Bapak Fredrik J. Pinakunary, selaku Advokat di FJP Law Office DKI Jakarta, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan tesis ini.
9. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., M.Hum. selaku Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi beserta data yang diperlukan guna menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh Dosen yang mengajar di Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh staf tata usaha yang sangat membantu dalam proses pengerjaan tesis ini sampai selesai.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi untuk semakin baik, oleh karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak yang bisa membangun dan dapat berfaedah bagi kita semua. Pada akhirnya, semoga penulisan hukum tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis menyatakan terima kasih, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 16 Juni 2022



Diana Dessy Novitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Pertimbangan Hakim Dalam Mempertimbangkan Dan Memutus Perkara Perdata	13
1.a.Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum Dan Keadilan	13
1.b.Peran Putusan Hakim Dalam Politik Hukum.....	15
2. Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> Dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara.....	17
2.a.Pengertian Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i>	17
2.b.Karakteristik Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i>	18
2.c.Perbandingan Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>).....	25
B. Landasan Teori	30
C. Batasan Konsep.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Jenis Penelitian	39
B. Metode Pendekatan	39
C. Sumber Data.....	40
1. Bahan Hukum Primer	40
2. Bahan Hukum Sekunder	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
1. Studi Kepustakaan	43
2. Wawancara	44
E. Analisis Data	45
F. Proses Berpikir	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Dasar-Dasar Pertimbangan Hukum Yang Dipergunakan Hakim Dalam Mempertimbangkan Dan Memutus Perkara Dengan Mekanisme Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i>	49
1. Hak (<i>Standing</i>) Dan Syarat-Syarat Formil Dalam Pengajuan Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i>	49
2. Dasar-Dasar Pertimbangan Hukum Yang Dipergunakan Hakim Dalam Perkara Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i>	55
B. Politik Hukum Pengaturan <i>Citizen Lawsuit</i> Ke Depan Agar Mampu Mengakomodasi Penuntutan Hak-Hak Warga Negara Secara Jelas Dan Komprehensif Dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara.....	64
1. Praktik <i>Citizen Suits</i> Di Amerika Serikat Sebagai Pedoman Pelaksanaan <i>Citizen Lawsuit</i> Di Indonesia.....	64
2. Politik Hukum Pengaturan <i>Citizen Lawsuit</i> Ke Depan Agar Mampu Mengakomodasi Penuntutan Hak-Hak Warga Negara Secara Jelas Dan Komprehensif Dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara	69
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pengaturan *Citizen Lawsuit* di Indonesia: Problem dan Solusi dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dan politik hukum pengaturan *citizen lawsuit* ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas, dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum dan juga dilakukan studi perbandingan hukum di negara lain tentang pengaturan *citizen lawsuit*. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1) Pasal 10 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum dalam mekanisme gugatan *citizen lawsuit* masih belum terwujud sehingga sangat perlu untuk diatur secara tegas mengenai mekanisme *citizen lawsuit* supaya ada keseragaman dalam penerapan hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Penulis mendasarkan pada studi banding dengan negara lain yang memiliki kesamaan terkait unsur-unsurnya dan mengadopsi praktik-praktik *citizen lawsuit* di Amerika. Pengaturan mengenai *citizen lawsuit* dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung, sehingga lebih bersifat jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara.

Kata Kunci: Politik Hukum, Gugatan, *Citizen Lawsuit*, Hak Sipil Warga Negara

ABSTRACT

The title of this thesis is “The Political Law Of Citizen Lawsuit Regulations in Indonesia: Problems And Solutions In Prosecuting Citizens’ Civil Rights”. The objective of this thesis is to find out and examine the basic legal considerations used by judges in considering and deciding cases with the mechanism of citizen lawsuits and the legal politics of regulating citizen lawsuits in the future in order to be able to accommodate the prosecution of citizens' rights in a clear and comprehensive manner in the prosecution of rights civilian citizens. This research is a normative research and it uses a political-legal approach which is also carried out by comparative studies of law in other countries regarding Citizen Lawsuit. The sources of the data are taken from secondary data which consists of primary law material and secondary law material. The data collecting methods are by doing a library research and interviews. The primary law material and the secondary law material are analyzed by using law analysis method. The deductive way of thinking process is used to draw the conclusion. The results of research and discussion on the basic legal considerations used by judges in considering and deciding cases with a citizen lawsuit mechanism, namely Article 4 paragraph (2), Article 5 paragraph (1) Article 10 paragraph (1), Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power, Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 17 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 13 of Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. Synchronization and harmonization of laws in the citizen lawsuit mechanism has not yet materialized, so it is very necessary to strictly regulate the citizen lawsuit mechanism so that there is uniformity in the application of the law and does not create uncertainty. The author is based on comparative studies with other countries that have similar elements and adopting citizen lawsuit practices in America. Regulations regarding citizen lawsuits are included in the Supreme Court Regulations, so that it is more clear and comprehensive in the prosecution of citizens' civil rights.

Keywords: *Legal Politics, Lawsuits, Citizen Lawsuit, Civil Rights of Citizens*